Korupsi dan Mental Rakus

Surya Online, Jumat, 5 Februari 2010

Oleh: Akh Muzakki

KH Mustofa Bisri menulis: “Anda bisa memperoleh bukti parahnya kondisi akhlak bangsa di mana2: di jalanan; di rumah2 tangga; di ruang2 sidang yg terhormat; di kantor2 pemerintah; di instansi2 penegakan hukum; di ruang2 pengadilan; di orsospol2; di sekolah2; kampus2; di TV2; di mass media; dlsb. Bahkan di status2 Facebook

Tulisan singkat Gus Mus itu diteruskan seorang kawan kepada saya. Pernyataan itu menyuguhkan makna yang sangat dalam. Kedalaman makna itu semakin menyentuh rusuk nurani saya, terutama saat saya berada di Kanada. Pasalnya, sejumlah kolega dari Kanada bertanya kepada saya, “Mengapa korupsi merajalela di Indonesia?” Belum terjawab pertanyaan itu, mereka pun bertanya kembali, “Apakah orang-orang Indonesia itu so greedy (rakus banget)?”

Saya pun dilanda dilema. Maunya melakukan diplomasi dengan sedikit mereduksi persepsi mereka soal korupsi di Indonesia, tapi faktanya memang benar. Mau mencoba menjelaskan yang sebenarnya, ada perasaan nasionalistis yang berbisik, “ngono yo ngono ning ojo ngono (meski benar begitu, ya tapi jangan begitu amat)”.

Saya pun akhirnya mencoba menjawab pertanyaan di atas dengan membandingkan fakta di Indonesia dan negara maju. Mungkin hanya di Indonesia ada pembedaan antara gaji dan pendapatan. Di negara-negara lain, apalagi negara maju, jarang kita mendengar pernyataan seperti ini, “gaji boleh kecil, tapi pendapatan besar”. Sebab, di negara-negara maju, gaji seseorang menjadi hitungan persis pendapatan. Sehingga, antara gaji dan pendapatan tak ada perbedaan. Meminjam istilah Gus Mus di muka, ucapan-ucapan seperti di atas bisa terdengar di jalanan, di rumah tangga, ruang-ruang persidangan, kantor-kantor pemerintahan hingga di lembaga-lembaga pendidikan.

Dari sinilah, kita bisa melihat mengapa setiap kali dibuka lowongan CPNS, setiap kali itu pula masyarakat membeludak. Mereka rela antre berjam-jam untuk sekadar mendapatkan formulir tes. Tak sedikit praktik jual-beli, sogok-menyogok, terjadi. Bahkan untuk memperebutkan kesempatan menjadi CPNS itu, nyawa harus dipertaruhkan, seperti yang digelar di Gelora Pantjasila Surabaya beberapa tahun silam. Pasalnya, gaji PNS bisa saja dibilang sedikit, tapi pendapatannya tak selalu harus disamakan dengan gaji yang diterima per bulan.

“Budaya” memberi dan menerima tips, fee, komisi dan sejenisnya semakin memperkuat pemahaman atas perbedaan gaji dan pendapatan. Padahal, dari praktik pemberian dan penerimaan sumber penghasilan seperti ini, korupsi merajalela. Sementara itu, administrasi birokrasi dibuat tidak jelas, antara batas “kantong

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pribadi" dan "kantong kantor". Kasus pemberian fee Bank Jatim yang saat ini ramai dibicarakan di publik tidak akan terjadi jika gaji dan pendapatan pejabat negara diatur sejelas-jelasnya.

Jaminan Negara

Kuatnya pembedaan gaji dan pendapatan serta buramnya batas uang pribadi dan uang kantor di atas semakin menemukan lahan penyemaiannya oleh model penyelenggaraan jabatan publik. Di negara maju, masa depan setiap anak bangsa dijamin negara. Jabatan publik ditegakkan dengan orientasi kuat pada penyiapan dan pemenuhan kebutuhan masa depan anak bangsanya secara keseluruhan, bukan perseorangan atau golongan.

Singkatnya, tidak boleh ada anak warga yang telantar akibat kesulitan ekonomi. Melalui tanggung jawab yang diberikan oleh rakyat, negara memberikan jaminan kehidupan, baik sosial maupun eknomi, melalui mekanisme jaminan kesejahteraan sosial. Karena itu, di negeri-negeri maju, warganya tak terbuai kehausan untuk menumpuk kekayaan bagi anak cucunya.

Pasal 34 ayat 1 UUD 1945 juga menjamin kehidupan warganya. "Fakir miskin dan anak-anak telantar dipelihara oleh negara". Semangat pasal tersebut sejatinya juga serupa dengan penjaminan kesejahteraan sosial sebagaimana di negara-negara maju. Tapi, dalam praktiknya, justru esensi "dipelihara" berubah menjadi "dilestarikan" oleh negara. Akibat ekstremnya, orang berebut menumpuk kekayaan walaupun dengan cara yang tidak sah untuk menghindari ketidakberuntungan hidup itu.

Mengharu-birunya praktik korupsi merupakan titik awal dan sekaligus terdalam dari penyelewenangan atas amanat konstitusi ini. Sebab, dari praktik korupsi inilah lalu jaminan kesejahteraan sosial justru tak bisa dijamin untuk tercipta. Kewajiban dan tanggung jawab untuk menciptakan jaminan bagi kesejahteraan sosial justeru, pada praktiknya, tergelontor sikap dan perilaku korup itu.

Saya menjelaskan fakta-fakta ini kepada kolega saya di Kanada. Minimal, saya mencoba untuk menjelaskan problem akut yang terjadi di negeri saya tanpa harus berapologi dan atau ber-ultranasionalisme tanpa fakta. Saya pun lalu memberikan catatan, reformasi birokrasi menjadi pilihan yang strategis untuk mengurai moral publik dalam rangkaian penyelenggaraan jabatan publik ini. Reformasi birokrasi ini harus dimulai dari model rekrutmen personel hingga model remunerasi.

Selebihnya, saya pun lalu lalu teringat pernyataan Buya Syafii Maarif (2008), "Untuk memberantas korupsi, yang harus dikembangkan adalah industri hati." Tentu, "industri hati" di sini dimaksudkan sebagai penyelenggaraan jabatan publik secara jujur dan bertanggung jawab. Wujudnya berupa empati yang besar pada kepentingan dan hajat hidup orang banyak, bukan pribadi atau golongan.

Jika "industri hati" sudah bangkrut, bangkrut pulalah penyelenggaraan jabatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

publik. Maka, pertanyaan kolega saya di Kanada soal apakah kita menjadi bangsa rakus, lalu menjadi sulit untuk dibantah. n

(Akh Muzakki, Dosen Pascasarjana IAIN Sunan Ampel, Surabaya. Sedang visiting scholar di CIDA, Ottawa, Kanada).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id